



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PEMULANGAN WNI KORBAN PENIPUAN DARING DARI MYANMAR

**Sita Hidriyah**

Analisis Legislatif Ahli Madya

[sita.hidriyah@dpr.go.id](mailto:sita.hidriyah@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah memulangkan sebanyak 84 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat praktik penipuan daring (*online scam*) di Myanmar pada 28 Februari 2025. Adapun proses pemulangan yaitu dari Myawaddy, Myanmar menuju Maesot, Thailand kemudian ke Bangkok dan diterbangkan ke Indonesia. Kemlu bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangon dan KBRI Bangkok telah berada di Maesot sejak 23 Februari 2025 untuk melakukan kontak intensif dengan sejumlah pihak di Thailand dan Myanmar. Otoritas Thailand memberikan izin melintas bagi para WNI melalui *Second Friendship Bridge* yang berada di perbatasan Myawaddy dan Maesot. Setibanya para WNI di Maesot, otoritas Thailand kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan, imigrasi, dan identifikasi untuk indikasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Sebelumnya, pihak berwenang dari China, Thailand, dan Myanmar menggelar operasi bersama untuk membongkar pusat penipuan di perbatasan Myanmar, Myawaddy, yang terkenal akan jaringan perdagangan manusianya di seluruh Asia Tenggara. Adapun operasi tersebut digelar selama beberapa pekan terakhir usai aktor China, Wang Xing, menjadi korban perdagangan manusia di Myanmar. Para korban pada umumnya dijanjikan pekerjaan di luar negeri. Namun, nyatanya mereka dijerumuskan ke dalam sindikat penipuan daring di mana mereka dijebak untuk melakukan penipuan terhadap orang-orang di seluruh dunia melalui kisah cinta palsu, penawaran investasi palsu, dan skema perjudian ilegal.

Hingga saat ini masih terdapat 366 WNI di Myawaddy, yang sedang diproses untuk segera dipulangkan. Jumlah ini mengingat pada perkembangannya, wajah korban perdagangan orang yang biasanya diisi dengan perempuan dari ekonomi rendah, telah meluas cakupannya dengan masyarakat laki-laki muda, bahkan sarjana dari lulusan perguruan tinggi. Ini menjadi bukti jika saat ini telah terjadi perluasan korban TPPO melalui penipuan daring.

Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan dengan kasus perdagangan orang yang subur. Hal ini dikarenakan belum terdapatnya platform bersama ASEAN guna melindungi pekerja migran. Sementara itu, Indonesia juga masih dianggap belum serius dalam memberantas perdagangan orang, namun faktanya pemerintah sulit mencegah terjadinya perdagangan orang dikarenakan modus kejahatan yang semakin berkembang dengan memanfaatkan media sosial menggunakan informasi pribadi yang diunggah calon korban. Situasi ini tentunya membutuhkan respons serta tindakan cepat dan nyata dari berbagai pihak, tidak terkecuali masyarakat luas yang perlu mendapat sosialisasi dan pelatihan memadai dalam mencegah penipuan terulang kembali. Aksi konkret tidak hanya diperlukan dari pemerintah Indonesia yang perlu mendapat apresiasi dalam hal memulangkan para korban. Pemerintah Myanmar dengan ketidakberdayaan hukumnya serta permasalahan internal lain tentunya akan semakin sulit untuk menghentikan TPPO. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia perlu bertindak tegas pula dalam menghentikan segala upaya pihak terkait yang membantu mengirimkan tenaga kerja ke wilayah Myanmar.

## Atensi DPR

Komisi I DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mengusulkan kepada pemerintah untuk peningkatan kewaspadaan akan peningkatan kasus TPPO yang banyak dialami oleh masyarakat Indonesia, terutama ke luar negeri. Selain itu, pemerintah juga perlu menekankan pentingnya penguatan kapasitas atau lembaga masyarakat di daerah-daerah, sehingga masyarakat dapat mewaspadai akan terjadi penipuan dalam lapangan pekerjaan. Komisi I DPR RI juga perlu memastikan kepada pemerintah untuk melakukan adanya sosialisasi secara dini bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri. Masalah TPPO juga harus segera diatasi guna melindungi rakyat Indonesia terutama pada wilayah yang memiliki kondisi akan kekurangan lapangan pekerjaan, sehingga korban penipuan daring tidak akan terus bertambah.

## Sumber

antaranews.com, 21 dan 28 Februari 2025;  
bbc.com, 1 Maret 2025;  
kompas.com, 28 Februari dan 1 Maret 2025; dan  
voaindonesia.com, 28 Februari 2025.

Minggu ke-4 Februari  
(24 Februari s.d. 2 Maret 2025)



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*